

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PENGGUNAAN
TANAH KAS PEMERINTAH DESA KEPUHARJO DENGAN PT. MERAPI
GELANGGANG WISATA**

Oleh:

Gani Sadat¹, Ari Hernawan²

Intisari

Tujuan penelitian mengenai Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tanah Kas Pemerintah Desa Kepuharjo dengan PT. Merapi Gelanggang Wisata. Dilakukan untuk mengetahui : 1) Bagaimana keberadaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa Kepuharjo dengan PT. Merapi Gelanggang Wisata selama 60 tahun ditinjau dari ketentuan daluwarsa. 2) Perlindungan hukum bagi Pemerintah Desa Kepuharjo terhadap perjanjian kerja sama dengan PT Merapi Gelanggang Wisata.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, sedangkan penelitian ini pada dasarnya bersifat deskriptif. Yuridis empiris yaitu mengumpulkan data primer yang ada di lapangan, berupa akta perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa Kepuharjo dengan PT Merapi Gelanggang Wisata dan wawancara pada pihak Pemerintah Desa Kepuharjo dan PT Merapi Gelanggang Wisata, setelah itu meneliti data sekunder dari perpustakaan dan melalui kajian peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) keberadaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa Kepuharjo dengan PT. Merapi Gelanggang Wisata selama 60 (enam puluh) tahun ditinjau dari ketentuan daluwarsa adalah sah karena telah sesuai dengan peraturan dan asas yang berlaku karena didalam perjanjian kerjasama tersebut diatur tentang penambahan dan pembaharuan secara bertahap setiap 5 (lima) tahun sekali, selain itu didalam perjanjian tersebut dikatakan bahwa para pihak dapat menambahkan dan memperbaharui perjanjian. Perjanjian tersebut menyatu dengan perjanjian kerjasama itu.2) Perlindungan hukum bagi Pemerintah Desa Kepuharjo terhadap perjanjian kerja sama dengan PT Merapi Gelanggang Wisata adalah diatur dalam perjanjian kerjasama. Para pihak mentaati dan tunduk pada pasal-pasal yang ada dalam perjanjian tersebut. Dilihat dari isi perjanjian kerjasama tersebut pihak pemerintah desa mengharapkan perlindungan yang lebih karena pihak desa merasa dengan adanya perjanjian ini kurang memberi dampak positif terhadap Pemerintah Desa Kepuharjo.

Kata kunci : perjanjian kerjasama, Tanah Kas Desa.

¹ Manggong, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta

² Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

JURIDICAL ANALYSIS TO THE COOPERATION AGREEMENT OF CASH LAND USE OF KEPUHARJO VILLAGE GOVERNMENT WITH PT. MERAPI GELANGGANG WISATA

By:

Gani Sadat³, Ari Hernawan⁴

ABSTRACT

The research purpose on Juridical Analysis to Cooperation Agreement of Cash Land Use of Kepuharjo Village Government with PT. Merapi Gelanggang Wisata. Conducted to know: 1) How are the existence of cooperation agreement between Kepuharjo Village Government with PT. Merapi Gelanggang Wisata for 60 years is reviewed from the expiration terms. 2) Legal protection for Kepuharjo Village Government on cooperation agreement with PT Merapi Gelanggang Wisata.

The research method used in this research is empirical juridical method, while this research is basically descriptive. The empirical juridical is to collect primary data in the field, in the form of cooperation agreement between Kepuharjo Village Government and PT Merapi Gelanggang Wisata and interview with Kepuharjo Village Government and PT Merapi Gelanggang Wisata, after that researching secondary data from library and through study of law regulation, Invitations and other legal materials relevant to this research.

The research results can be stated that 1) the existence of cooperation agreement between Kepuharjo Village Government parties and PT. Merapi Gelanggang Wisata for 60 (sixty) years reviewed from the expiration provisions is valid because it is in accordance with the rules and principles applicable because in the cooperation agreement is regulated about the addition and renewal gradually every 5 (five) years, in addition in the agreement is said that the parties may add and renew the agreement. The agreement is merged with that cooperation agreement. 2) Legal protection for Kepuharjo Village Government on cooperation agreement with PT Merapi Gelanggang Wisata is arranged in cooperation agreement. The parties obey and submit to the articles contained in the agreement. Viewed from the contents of the cooperation agreement the village government expects more protection because the village parties felt with this agreement less positive impact on the Government of Kepuharjo Village Government.

Keywords: Cooperation Agreement, Village Cash Land.

³ Manggong, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta

⁴ Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta